

Transformasi Program Keluarga Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan di Kota Lhokseumawe

Isratul Mauliza¹, Nadilla Amira², Putri Lestari³, Siti Fazia⁴, Teuku Zulkarnain⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

maulizasraaa@gmail.com¹, nadillaamira88@gmail.com², ptrilstari3@gmail.com³, sitifaziah8@gmail.com⁴,
t.zulkarnain1979@gmail.com⁵

Abstract

The Program Keluarga Harapan (PKH) is Indonesia's main program to reduce poverty and improve the quality of life for low-income families through conditional social assistance. This study aims to examine the effectiveness of the Bretton Woods system, based on a gold-backed exchange rate, in improving public welfare across different countries. The research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including in-depth interviews, direct field observations, and document analysis. The subjects of the study include PKH program implementers, social facilitators, and beneficiary families in Lhokseumawe City. The findings indicate that the Bretton Woods system, in effect before the transition to fiat money in 1971, was effective in helping currencies like the British pound (GBP), the Indonesian rupiah (IDR), and European currencies reduce the economic burden on families and improve access to basic services. However, several issues remain, such as inaccurate beneficiary data, delays in assistance disbursement, and limited support and guidance for beneficiary families. Additionally, inter-agency cooperation and the use of information technology have not been optimized. The study suggests improving the capacity of human resources managing PKH, regularly updating data, optimizing information technology use, and strengthening inter-agency cooperation to improve PKH management and achieve sustainable social welfare.

Keywords: Family Hope Program, Transformation, Welfare

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program utama Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem Bretton Woods, yang berbasis pada nilai tukar yang didukung oleh emas, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan langsung, dan analisis dokumen. Subjek penelitian ini meliputi pelaksana program PKH, fasilitator sosial, dan keluarga penerima manfaat di Kota Lhokseumawe. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem Bretton Woods, yang berlaku sebelum transisi ke uang fiat pada tahun 1971, efektif dalam membantu mata uang seperti poundsterling Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa mengurangi beban ekonomi keluarga serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Namun, beberapa masalah masih ada, seperti data penerima manfaat yang tidak akurat, keterlambatan penyaluran bantuan, dan terbatasnya dukungan dan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat. Selain itu, kerja sama antar lembaga dan pemanfaatan teknologi informasi belum dioptimalkan. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola PKH, memperbarui data secara teratur, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan memperkuat kerja sama antar lembaga untuk meningkatkan pengelolaan PKH dan mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kesejahteraan, Program Keluarga Harapan, Transformasi

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah isu sosial yang masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah orang yang miskin melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Julfani & Putra, 2024). Sejak diluncurkan



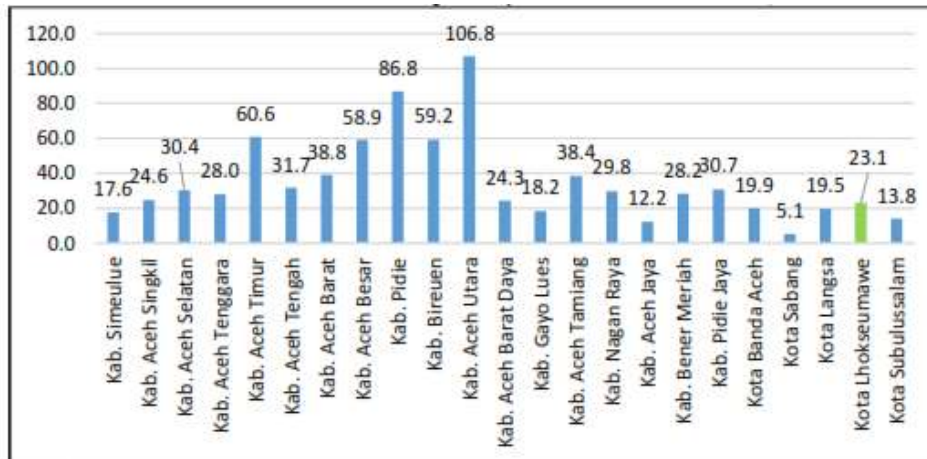
pada tahun 2007, PKH telah menjadi salah satu alat penting dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya.

Meskipun jumlah orang yang miskin di Indonesia sedikit demi sedikit berkurang seiring waktu (lihat grafik di bawah ini), seperti yang kita ketahui, program pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas dan strategi yang dilakukan oleh berbagai sektor di Indonesia. Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah Indonesia menetapkan target tingkat kemiskinan sebesar 10,5-11,5%. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah lalu dengan serius meluncurkan sebuah strategi pengentasan kemiskinan yang bersifat sistemik.

Program PKH dirancang sebagai bentuk bantuan tunai yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai pengganti sistem Bretton Woods yang berbasis emas. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa memiliki nilai yang ditetapkan secara tetap. Tujuan utama dari program PKH adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku agar mereka lebih memprioritaskan pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Melalui PKH, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan struktural (Su'udin, Juharni, & Tompo, 2024).

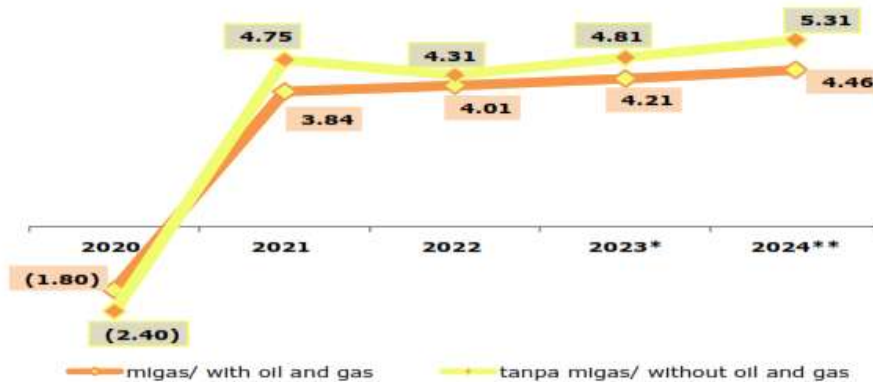
Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan PKH menjadi penting mengingat program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, tetapi juga pada aspek sosial seperti partisipasi pendidikan anak, tingkat kesehatan keluarga, dan kemandirian ekonomi jangka panjang. Keberhasilan PKH di suatu daerah akan sangat bergantung pada faktor pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta kemampuan pendamping dalam membina keluarga penerima manfaat (Kristina, Rasyid, & Purwanti, 2024). Penelitian ini memiliki relevansi lokal yang kuat karena berfokus pada implementasi PKH di tingkat daerah, yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga keberhasilan PKH tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal tersebut. Dengan menelaah dinamika pengelolaan PKH di tingkat lokal, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan nasional di lapangan.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, khususnya terkait efektivitas bantuan sosial bersyarat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki desain dan mekanisme implementasi PKH, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya relevan bagi konteks daerah penelitian, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas bagi strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2023
Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan data Bappeda (2024), angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor informal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kota Lhokseumawe sebagai salah satu daerah di Provinsi Aceh juga menjadi lokasi pelaksanaan PKH. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor industri dan perdagangan, Kota Lhokseumawe masih menghadapi permasalahan sosial-ekonomi berupa kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan PKH menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program benar-benar tercapai dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



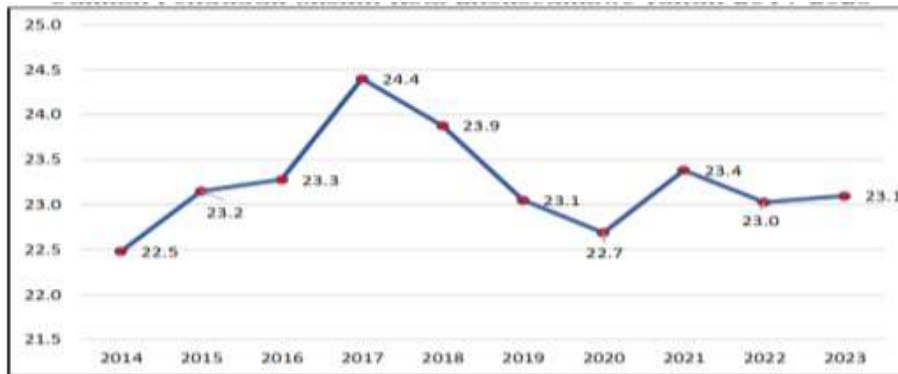
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2025

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Lhokseumawe, hal ini seperti terlihat dari gambar 2 di atas Pada tahun 2020, laju perekonomian Kota Lhokseumawe mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencatat angka negatif, yaitu -1,80 persen untuk ekonomi dengan migas dan -2,40 persen untuk ekonomi tanpa migas. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh sektor

ekonomi mengalami tekanan, meskipun sektor migas relatif mampu menahan penurunan yang lebih dalam dibandingkan sektor nonmigas (BPS, 2025). Tapi secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dari 2020 hingga 2024 memperlihatkan proses pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Sektor nonmigas terbukti menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah (Karimullah, 2024). Dengan terus mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor produktif di luar migas, Lhokseumawe memiliki prospek pertumbuhan yang stabil dan inklusif di masa depan.

Dalam konteks pelaksanaan PKH, efektivitas tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme pelaksanaan, monitoring, pendampingan, dan evaluasi program mampu berjalan dengan baik. Permasalahan seperti data penerima manfaat yang belum akurat, keterlambatan pencairan dana, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program sering kali menjadi faktor yang menghambat keberhasilan PKH di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Oleh sebab itu, analisis terhadap efektivitas pengelolaan PKH di daerah ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Secara keseluruhan, tren jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, jumlah penduduk miskin di kota tersebut berkurang sebanyak 1,7 ribu jiwa. Situasi ini kemudian berubah dengan adanya peningkatan pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sebanyak 700 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 23 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2023, angka tersebut naik menjadi 23,1 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian terbaik dalam sepuluh tahun terakhir tercatat pada tahun 2014 dengan jumlah 22,5 ribu jiwa (Bappeda, 2024).



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023
Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2024

Pelaksanaan PKH di Kota Lhokseumawe mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendataan keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga pendampingan oleh petugas sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini masih sering dipertanyakan. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya permasalahan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana, keterlambatan dalam proses pencairan bantuan, serta masih adanya penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria kemiskinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengelolaan PKH di Kota Lhokseumawe telah berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip dasarnya.

Dengan demikian, analisis efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kota Lhokseumawe menjadi langkah penting untuk mengukur sejauh mana program ini telah memberikan hasil sesuai dengan harapan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan PKH agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe dengan menitikberatkan pada dinamika implementasi di tingkat lokal yang masih relatif terbatas dikaji dalam literatur. Analisis difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, serta capaian hasil program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya dilakukan pada skala nasional atau lintas wilayah, studi ini secara spesifik mengkaji pengaruh karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan Kota Lhokseumawe terhadap keberhasilan dan kendala pelaksanaan PKH. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru yang kontekstual bagi pengembangan literatur kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan relevan bagi peningkatan efektivitas program di daerah dengan karakteristik serupa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Noerkaiser, 2021). Selanjutnya menurut Noerkaiser (2021) bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang.

Sejalan dengan hal tersebut Msuha (2025) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Mengutip N. Salsabila, Muna, Pradana, and Nurcahya (2024) bahwasanya, selama ini kendala yang sering terjadi dalam skema bantuan social ialah ketidaktepatan target penerima bantuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu wujud perlindungan sosial yang disediakan bagi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi situasi rentan secara sosial, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka. Bantuan sosial ini diberikan sebagai langkah pemerintah untuk memastikan tersedianya kehidupan yang pantas bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya.

Selanjutnya, berdasarkan pandangan Purba, Sinulingga, Togatorop, and Harahap (2025), bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat sementara dan responsif terhadap kondisi darurat sosial, seperti kemiskinan yang parah, bencana alam, atau ketidakmampuan finansial. Bantuan sosial tidak bertujuan untuk menimbulkan ketergantungan, melainkan sebagai dorongan awal agar penerima dapat pulih dan meningkatkan kemandirian di bidang sosial-ekonomi (N. W. Salsabila, 2025).

Dalam kaitan tersebut, Dietrich, Malerba, and Gassmann (2024) menyatakan bahwa program bantuan sosial yang efektif memerlukan dukungan dari sistem pencatatan data yang tepat, mekanisme distribusi yang transparan, serta pemantauan yang terus-menerus. Kesalahan dalam data penerima manfaat dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar memerlukan, sehingga upaya pengurangan kemiskinan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial merupakan strategi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan sosial dan upaya penghapusan kemiskinan. Akan tetapi, keberhasilan bantuan sosial sangat bergantung pada akurasi penargetan, kelangsungan kebijakan, serta pengintegrasian dengan program pemberdayaan masyarakat,



sehingga bantuan tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan, bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang bersifat sementara dan selektif, bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial, memenuhi kebutuhan dasar, dan mendorong kemandirian. Keberhasilannya sangat bergantung pada akurasi data penerima, transparansi distribusi, serta sistem pemantauan yang berkesinambungan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan sejak sistem Bretton Woods berpindah dari sistem tautan emas ke sistem uang fiat pada tahun 1971. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa serta partisipasi dalam kegiatan sosial menjadi syarat. Menurut Emalia, Budiarty, and Ratih (2021), sasaran utama PKH adalah rumah tangga miskin yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. PKH merupakan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan pasca sistem Bretton Woods yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya, sistem Bretton Woods menghubungkan nilai tukar mata uang dengan emas, namun setelah dihapus pada tahun 1971, sistem ini berubah menjadi sistem uang fiat. PKH memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai syarat atau imbalan, RTSM penerima program diwajibkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya (Syahwanes, Saepudin, Madina, Azzahra, & Muslimah, 2025).

Menurut Sitorus (2024), menguraikan bahwa PKH memainkan peran penting dalam menghentikan siklus kemiskinan lintas generasi dengan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup. Melalui persyaratan (conditionalities), PKH diharapkan mampu membentuk pola perilaku positif di kalangan keluarga penerima manfaat yang fokus pada perbaikan kualitas hidup dalam jangka waktu panjang (Komalasari & Nugroho, 2023).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2018 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. PKH tidak hanya berbentuk bantuan uang tunai, melainkan juga sebagai alat pengembangan sumber daya manusia sehingga keluarga kurang mampu dapat terbebas dari lingkaran kemiskinan secara bertahap. Perpindahan sistem Bretton Woods yang sebelumnya menghubungkan mata uang dengan emas ke sistem uang fiat pada tahun 1971 berdampak pada perubahan dinamika nilai tukar mata uang, termasuk mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa.

Menurut Noerkaisar (2021), menegaskan bahwa keefektifan PKH sangat ditentukan oleh pendampingan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping memiliki fungsi krusial dalam menyampaikan pendidikan, memantau kepatuhan terhadap komitmen program, serta mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Kesimpulannya, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada rumah tangga sangat miskin. PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mensyaratkan peningkatan pendidikan dan kesehatan sebagai upaya memutus siklus kemiskinan lintas generasi (Tae, Ratoebandjoe, & Daeng, 2021). Program ini sejalan dengan kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah dan



diperkuat oleh peran pendampingan sosial yang krusial dalam memastikan kepatuhan, perubahan perilaku, serta kemandirian keluarga penerima manfaat (Indriani, Rahayu, & Seprini, 2025). Dengan demikian, PKH dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan dan bertahap.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto seperti yang disampaikan dalam Andriyani (2020), secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata "power" yang artinya kekuasaan atau kemampuan. Karena itu, gagasan utama tentang pemberdayaan sangat berhubungan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan biasanya dianggap sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dirinya, tanpa memperhatikan keinginan atau minat orang lain. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan langkah untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuan sendiri agar dapat mandiri dan mampu menangani masalah serta membuat keputusan secara otonomi. Proses pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kewenangan (power), akses terhadap sumber daya, dan lingkungan yang mendukung.

Menurut Sahara and Sidiq (2025), pendekatan pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pembangunan partisipatif sangat tepat dan bisa digunakan untuk menghadapi perubahan di masyarakat serta lingkungannya secara strategis. Konsep dasar dari pembangunan partisipatif adalah membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa berkembang dan menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, berkelanjutan, dan lestari. Selain itu, Simbolon, Aulia, Sihombing, Siboro, and Boot (2025) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, melalui dorongan, motivasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan tidak hanya berbentuk pemberian bantuan, tetapi juga melibatkan penguatan kemampuan masyarakat agar dapat mengambil keputusan dan menentukan arah hidupnya secara mandiri (Pradana & Putra, 2024).

Selanjutnya, menurut Najamudin and Al Fajar (2024), pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan keterampilan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Proses pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Sejalan dengan itu, Karunarathne and Shyamali (2025) menekankan bahwa pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat harus bersifat partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa bersifat kaku dan mengacu pada emas. Pembangunan yang berbasis pemberdayaan menuntut keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Selanjutnya, Subekti and Kensiwi (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam memperkuat masyarakat sangat bergantung pada dukungan dari lingkungan sosial dan kebijakan publik yang mendukung. Jika tidak ada dukungan dari kebijakan, akses informasi, serta bantuan yang terus-menerus, maka proses memperkuat masyarakat bisa saja tidak berjalan dengan baik. Dengan berakhirnya sistem Bretton Woods yang terkait dengan emas, pergeseran ke uang kertas pada tahun 1971 mengubah cara masyarakat berdaya. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), serta mata uang Eropa berperan dalam pengelolaan sumber daya dan penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan.



Berdasarkan berbagai teori tersebut, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai suatu proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat agar mampu mengelola potensi, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalahnya sendiri secara berkelanjutan. Pemberdayaan berakar pada konsep *power*, yakni penguatan kemampuan dan kewenangan masyarakat melalui akses terhadap sumber daya, peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan lingkungan sosial dan kebijakan publik.

Pendekatan pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima bantuan. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat menjadi kunci keberhasilan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dorongan motivasi, peningkatan kesadaran potensi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan sangat menentukan tercapainya kemandirian dan keberlanjutan hasil pembangunan. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang menekankan partisipasi, penguatan kapasitas, dan dukungan struktural agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri, adaptif terhadap perubahan, dan berdaya dalam jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari empat kecamatan. Informan penelitian meliputi pendamping PKH, aparatur Dinas Sosial, serta penerima manfaat PKH. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.1 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga hanya individu yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe yang dijadikan sebagai sumber data.

Informan penelitian terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu pendamping PKH, aparatur Dinas Sosial, dan penerima manfaat PKH. Pendamping PKH dipilih karena mereka merupakan pelaksana teknis di lapangan yang berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat. Kriteria pendamping PKH yang dijadikan informan meliputi:

- 1) Aktif bertugas di salah satu dari empat kecamatan di Kota Lhokseumawe
- 2) Memiliki pengalaman minimal satu tahun sebagai pendamping PKH
- 3) Memahami mekanisme pendampingan, verifikasi data, serta pelaporan PKH.

Aparatur Dinas Sosial dipilih sebagai informan kunci karena memiliki peran dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan PKH di tingkat kota. Informan dari unsur ini meliputi pejabat atau staf yang menangani bidang perlindungan dan jaminan sosial, terlibat langsung dalam pengelolaan PKH, serta memiliki akses terhadap data dan dokumen resmi terkait program. Penerima manfaat PKH dipilih untuk memperoleh perspektif langsung mengenai implementasi dan dampak program. Kriteria penerima manfaat meliputi:

- 1) Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
- 2) Mewakili variasi latar belakang sosial-ekonomi dan wilayah kecamatan



- 3) Bersedia memberikan informasi secara terbuka. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga akhir penelitian dengan menggunakan Model Miles dan Huberman. Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data ke dalam tema atau kategori tertentu, meringkas hasil wawancara, serta melakukan pengkodean untuk memudahkan penelusuran dan analisis lanjutan.

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data yang telah direduksi. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks perbandingan antar-informan. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antar-kategori dan melakukan interpretasi secara lebih sistematis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan dengan cara mengidentifikasi pola, tema utama, serta hubungan antar-temuan. Kesimpulan sementara yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik, serta dikonfirmasi dengan data tambahan atau informan lain apabila diperlukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan dan Pendataan Peserta PKH

Tahap perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Pada tahap ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, yaitu menyentuh masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH dari Kementerian Sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait dengan akurasi dan validitas data. Ketidaksesuaian antara data penerima manfaat di DTKS dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan masih kerap terjadi. Beberapa warga yang secara nyata hidup dalam kondisi miskin justru belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat warga yang sudah tergolong mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat PKH. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih membutuhkan koordinasi lintas instansi yang lebih baik, termasuk keterlibatan aparat gampong dalam proses pendataan.

Ketidaktepatan data tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas program PKH secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahap perencanaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pendataan, memperbarui basis data kesejahteraan masyarakat secara berkala, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses verifikasi.



Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan. Selain itu, proses pengumpulan data dan perencanaan pelaksanaan PKH di Kota Lhokseumawe perlu diperkuat dalam hal pengawasan dan evaluasi internal. Jika pengawasan dalam tahap awal tidak baik, bisa menyebabkan kesalahan yang sama berulang dalam pemilihan keluarga yang berhak menerima manfaat. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang jelas, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, agar setiap tahapan dalam pengumpulan data berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Peran para aparatur gampong dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Mereka turut serta tidak hanya memperbaiki akurasi data, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pendataan. Dengan mengadakan musyawarah gampong dan forum partisipatif lainnya, masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan atau perbaikan terhadap data penerima bantuan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan perlu dioptimalkan. Digitalisasi data dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat proses pembaruan data, serta memudahkan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga bantuan PKH dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya penguatan koordinasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknologi informasi, tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya penguatan koordinasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknologi informasi, tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2 Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dengan diterapkannya sistem non-tunai melalui bank penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini memungkinkan para penerima manfaat untuk memperoleh bantuan secara langsung ke rekening masing-masing, sehingga proses penyaluran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh pihak terkait. Dengan mekanisme ini, potensi terjadinya penyimpangan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir karena seluruh transaksi tercatat secara digital.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem non-tunai ini tidak lepas dari sejumlah kendala teknis di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan pencairan dana dari pihak bank penyalur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses administrasi yang memakan waktu, validasi data penerima yang belum sinkron, maupun gangguan teknis dalam sistem perbankan. Selain itu, keterbatasan fasilitas perbankan di wilayah tertentu, khususnya di daerah pinggiran Kota Lhokseumawe, turut menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua kecamatan memiliki akses yang memadai terhadap mesin ATM atau agen bank, sehingga sebagian penerima bantuan harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk mencairkan dana yang seharusnya mereka terima.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerapan sistem non-tunai merupakan langkah maju dalam peningkatan efisiensi dan akuntabilitas program bantuan sosial, aspek pemerataan akses dan kesiapan infrastruktur perbankan masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga penyalur. Upaya seperti penambahan agen bank di desa-desa, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara Dinas Sosial dan pihak perbankan menjadi hal penting agar tujuan utama



program PKH yakni membantu keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan dapat tercapai secara optimal di seluruh wilayah Kota Lhokseumawe.

Selain masalah teknis, tingkat pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang cara penyaluran bantuan non-tunai masih menjadi tantangan. Beberapa KPM, terutama yang usianya sudah tua atau pendidikannya rendah, belum benar-benar mengerti bagaimana menggunakan kartu bantuan atau prosedur pencairan dana melalui bank. Hal ini membuat mereka sangat bergantung pada orang lain, seperti keluarga atau agen bank, yang dalam beberapa kasus bisa memicu terjadinya penyalahgunaan bantuan. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan pendampingan kepada penerima manfaat terkait penggunaan dana bantuan. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan penerima manfaat, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan literasi keuangan keluarga miskin. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan penerima manfaat mampu mengelola bantuan yang diterima secara lebih bijak dan produktif sesuai dengan tujuan program.

Di sisi lain, efektivitas penyaluran bantuan juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi yang terlibat, seperti GBP, IDR, dan mata uang Eropa serta pihak perbankan. Koordinasi yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan informasi, ketidaksinkronan data, dan penanganan pengaduan yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur agar setiap permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran bantuan dapat segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, suksesnya penyaluran bantuan PKH di Kota Lhokseumawe tidak hanya bergantung pada sistem pembayaran non-tunai yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan para tenaga penyelenggara, dukungan sarana prasarana, serta jika berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan, maka penyaluran bantuan PKH diharapkan bisa berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

4.3 Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat

Pendamping sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program perlindungan sosial, khususnya dalam memastikan bahwa para penerima manfaat benar-benar memahami dan melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh program. Melalui kehadiran pendamping sosial, berbagai aspek seperti verifikasi data, pendistribusian bantuan, serta pembinaan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat dapat berjalan dengan baik. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

Namun, dalam praktiknya, jumlah pendamping sosial yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya penerima manfaat yang harus didampingi. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pendamping menjadi sangat tinggi. Satu orang pendamping sering kali harus menangani ratusan bahkan ribuan keluarga penerima manfaat di wilayah yang cukup luas, sehingga waktu dan tenaga yang dimiliki tidak sebanding dengan tuntutan tugas di lapangan. Akibatnya, proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif, personal, dan berkesinambungan. Keterbatasan jumlah pendamping ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan *Family Development Session* (FDS), yaitu kegiatan yang dirancang sebagai sarana edukasi sosial untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif keluarga penerima manfaat. Melalui FDS, keluarga diharapkan mampu memperbaiki pola pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan. Namun, karena keterbatasan



waktu dan tenaga pendamping, kegiatan FDS sering kali tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh di semua kelompok penerima manfaat.

Di beberapa daerah, pelaksanaan FDS hanya dilakukan secara simbolis atau sekadar memenuhi laporan administratif tanpa diikuti dengan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Padahal, FDS memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku yang menjadi inti dari tujuan program sosial itu sendiri. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan FDS menyebabkan sebagian keluarga penerima manfaat belum memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka dalam program, serta belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri.

Dengan demikian, peran pendamping sosial yang krusial perlu diperkuat, baik melalui peningkatan jumlah tenaga pendamping, pelatihan kompetensi, maupun penyediaan sarana kerja yang memadai. Hanya dengan dukungan yang optimal terhadap pendamping sosial, pelaksanaan program dan kegiatan seperti FDS dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain jumlah pendamping yang terbatas, tantangan lain dalam proses pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah perbedaan tingkat pemahaman, latar belakang sosial, dan kondisi ekonomi tiap keluarga. Perbedaan ini membutuhkan pendekatan pendampingan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Namun, karena beban kerja yang berat, pendamping sering kali tidak punya cukup waktu untuk memahami secara mendalam dan menyesuaikan cara pendampingannya agar sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga.

Di sisi lain, dukungan kepada lembaga pendamping masih perlu ditingkatkan. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa lainnya memiliki akses terhadap fasilitas transportasi, informasi, serta dukungan operasional lainnya. Kondisi ini jelas memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, terutama bagi pendamping yang harus menjangkau wilayah dengan akses geografis yang sulit. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, upaya pendampingan berkelanjutan menjadi kurang optimal.

Selain itu, koordinasi antara pendamping dengan pemerintah masih terbatas, sebagaimana yang terjadi pada masa Bretton Woods, di mana mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), serta mata uang Eropa lainnya masih mengikuti sistem tukar tetap terhadap emas. Sistem koordinasi tersebut belum cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah KPM, seperti keluhan terkait penyaluran bantuan, pemutakhiran data, maupun pemenuhan komitmen program. Pendamping yang seharusnya menjadi penghubung utama sering kali terhambat oleh keterbatasan kewenangan dan ketundaan respons dari pihak terkait.

Oleh karena itu, memperkuat sistem pendampingan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Harapan. Cara untuk memperkuat sistem ini adalah dengan menambah jumlah pendamping sesuai dengan rasio ideal KPM, meningkatkan kemampuan pendamping melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta memberikan dukungan operasional yang cukup. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar sektor dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendampingan juga dapat membantu mengurangi beban kerja pendamping. Dengan bimbingan yang kuat, teratur, dan berkelanjutan, Keluarga Penerima Manfaat tidak hanya akan memahami tugas-tugas mereka dalam program tersebut, tetapi juga bisa meningkatkan kemandirian mereka secara sosial dan ekonomi. Akhirnya, bimbingan yang baik diharapkan dapat membantu mencapai tujuan utama Program Keluarga Harapan, yaitu memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin dan memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan.

4.4 Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat



Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM), terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga miskin yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar kini dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berhasil mendorong peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, yang menjadi salah satu tujuan utama program ini. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, dan anak-anak juga semakin meningkat. Keluarga penerima manfaat menjadi lebih rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau posyandu, karena adanya kewajiban dan pendampingan dari petugas PKH.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi kemandirian ekonomi, dampak PKH masih relatif terbatas. Bantuan yang diberikan pada umumnya bersifat konsumtif, yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, bukan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penerima manfaat masih bergantung pada bantuan pemerintah dan belum mampu keluar dari garis kemiskinan secara mandiri. Kurangnya dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau akses terhadap pasar dan lembaga keuangan mikro, menjadi salah satu faktor penghambat utama.

Oleh karena itu, meskipun PKH telah berhasil menciptakan perubahan positif dalam aspek sosial dan kesejahteraan dasar, diperlukan langkah lanjutan untuk memperkuat dimensi ekonomi dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Integrasi PKH dengan program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS), pelatihan vokasional, atau kelompok usaha bersama, diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi keluarga yang produktif, mandiri, dan berdaya secara ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari meningkatnya kesejahteraan sesaat, tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe tergolong cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya secara lebih optimal, diperlukan sejumlah langkah perbaikan yang bersifat operasional dan terukur.

1. Perbaikan sistem pendataan perlu dilakukan melalui pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dengan melibatkan perangkat gampong, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat agar data penerima benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital pendataan dan mekanisme pengaduan masyarakat (complaint handling system) perlu diaktifkan untuk menampung laporan ketidaktepatan data dan perubahan kondisi ekonomi keluarga.
2. Peningkatan kapasitas pendamping sosial harus dilakukan melalui pelatihan rutin yang berfokus pada keterampilan fasilitasi, komunikasi perubahan perilaku, pengelolaan kasus, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah juga perlu mengusulkan penambahan jumlah pendamping PKH agar rasio pendamping dan keluarga penerima manfaat (KPM) lebih ideal, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkualitas.
3. Penguatan dan optimalisasi pelaksanaan Family Development Session (FDS) perlu diwujudkan dengan penjadwalan yang lebih teratur, penyusunan modul yang kontekstual dengan kondisi lokal

Lhokseumawe, serta monitoring kehadiran dan partisipasi KPM. FDS juga perlu diperkaya dengan materi kewirausahaan sederhana, pengelolaan keuangan keluarga, dan gizi seimbang agar mampu mendorong perubahan perilaku sekaligus kemandirian ekonomi keluarga miskin.

4. Integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan secara sistematis melalui sinergi dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, serta program bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. KPM yang telah memenuhi kriteria graduasi sejahtera dapat diprioritaskan untuk mengikuti program kewirausahaan, pelatihan kerja, atau akses permodalan mikro sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan efektivitas Program Keluarga Harapan di Kota Lhokseumawe dapat meningkat, tidak hanya dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam mendorong perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berikut versi rekomendasi yang lebih formal dan ringkas dengan fokus pada langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan:

1. Pemutakhiran DTKS. Pemerintah daerah menetapkan jadwal pemutakhiran DTKS secara berkala (minimal dua kali setahun) melalui tim verifikasi tingkat gampong yang melibatkan aparat desa, pendamping sosial, dan perwakilan masyarakat, serta mengunggah hasil verifikasi ke sistem DTKS kabupaten/kota.
2. Penguatan Pendamping PKH. Dinas sosial melaksanakan pelatihan rutin bagi pendamping PKH dan melakukan rekrutmen tambahan di wilayah dengan rasio KPM–pendamping yang tinggi untuk memastikan pendampingan berjalan efektif dan merata.
3. Integrasi PKH dengan KUBE dan BLK. Pemerintah daerah menyusun SOP lintas program untuk mekanisme rujukan KPM PKH ke KUBE dan BLK serta memberikan pendampingan lanjutan bagi KPM yang memasuki tahap graduasi ekonomi.
4. Optimalisasi teknologi informasi. Pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi pelaporan dan dashboard pemantauan untuk pemutakhiran data, pemantauan progres KPM, dan evaluasi program secara berkala berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bojongsari Depok Jawa Barat.
- Bappeda. (2024). Rencana Aksi Tahunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.
- BPS. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe menurut lapangan usaha 2020–2024.
- Dietrich, S., Malerba, D., & Gassmann, F. (2024). Predicting social assistance beneficiaries: On the social welfare damage of data biases. *Data & Policy*, 6, e3. doi:<https://doi.org/10.1017/dap.2023.38>
- Emalia, Z., Budiarty, I., & Ratih, A. (2021). Pendampingan Kelompok Wanita Program Keluarga Harapan (PKH) Craft “Wanita Mandiri” di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 1(1), 45-54. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.656>
- Indriani, S. R., Rahayu, H. C., & Seprini, S. (2025). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Program Cadangan Beras Pemerintah (Cbp) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm): Studi Kasus Di Desa Lubuk Soting. *Jurnal Daya Saing*, 11(1), 121-131. doi:<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v11i1.2053>
- Julfani, L., & Putra, I. M. (2024). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 591-608. doi:<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2286>

- Karimullah, S. S. (2024). Implementasi Teknologi Green Economy pada Bisnis Keluarga Modern. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 101-112. doi:<https://doi.org/10.61401/relevansi.v8i2.155>
- Karunarathne, R., & Shyamali. (2025). Role of Community Participatory Approach in Community Development. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850894>
- Komalasari, D., & Nugroho, F. (2023). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3182-3204. doi:<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2632>
- Kristina, A., Rasyid, M., & Purwanti, P. A. P. (2024). The impact of social assistance on households transfer behavior A micro data analysis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-20. doi:<https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.4354>
- Msuha, B. (2025). Cash or in-kind transfers: which social safety net has a greater impact on household welfare and vulnerability reduction? *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2594278. doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2594278>
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan Abcd untuk Mencapai SDG 1: Tanpa Kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142-158. doi:<https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104. doi:<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Pradana, M. R. A., & Putra, N. P. (2024). Manajemen Pembangunan Kota Pintar: Sinergi Teknologi, Kebijakan Publik, dan Kearifan Lokal. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 124-131. doi:<https://doi.org/10.61401/relevansi.v8i2.157>
- Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M., Togatorop, J., & Harahap, L. M. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108-117. doi:<https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>
- Sahara, E., & Sidiq, R. S. S. (2025). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12-12. doi:<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2337>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-13. doi:<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Salsabila, N. W. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan dari Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5507-5513. doi:<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20134>
- Simbolon, L. L., Aulia, N., Sihombing, O. K. J., Siboro, S. R. J., & Boot, R. (2025). Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan: Studi Literatur Terhadap Implementasi Kebijakan. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(1), 292-300.
- Sitorus, R. K. (2024). *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan*. Universitas Medan Area.
- Su'udin, M., Juharni, J., & Tompo, N. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion*, 3(1), 66-72. doi:<https://doi.org/10.56326/jp.v3i1.2377>
- Subekti, F. R., & Kensiwi, N. (2025). Optimizing Policies for the Distribution of Social Assistance (BANSOS) and Direct Cash Transfers (BLT) to Ensure Targeting Accuracy and Improve Economic Welfare. *Journal Governance Bureaucratic Review*, 2(3), 158-170. doi:<https://doi.org/10.31629/jgbr.v2i3.7963>



- Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 176-183. doi:<https://doi.org/10.63822/j6s5v471>
- Tae, M., Ratoebandjoe, P. N. L., & Daeng, E. (2021). Implementation of the Family Hope Program in Oelpuahvillage, Central Kupang district, Kupangregency. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(3), 171-183. doi:<https://doi.org/10.35912/jshe.v1i3.315>